

**DINAMIKA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA
BOGOR PADA ERA ORDE BARU****BIMO ADRIAWAN**

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

Email: bimo.adrn@rocketmail.com**ARDITYA PRAYOGI**Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
UIN KH Abdrurahman Wahid PekalonganEmail: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id**ABSTRAK**

Telaah historis yang mendasarkan pada data kuantitatif seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu wilayah masih sering menjadi domain ilmu sosial ekonomi, utamanya ilmu ekonomi pembangunan. Dalam hal ini kemudian artikel ini bertujuan untuk memberikan telaah pada berbagai data statistik tersebut yang dengannya dapat tergambar suatu historiografi dengan cerita yang utuh. Kota Bogor memiliki sejarah panjang pada aspek pendidikan (formal) karena Bogor dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai kota pusat administrasi dan pemerintahan hingga berlangsung pada masa orde baru. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dari hasil ulasan didapatkan gambaran bahwasanya kebijakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah kota Bogor berpedoman pada rencana pembangunan pemerintah pusat dan kondisi lokal. Pemerintah kota Bogor mengeluarkan berbagai kebijakan pembangunan pendidikan dimana selama lima tahun penerapan kebijakan, pendidikan di kota Bogor secara umum mengalami kemajuan.

Kata Kunci: Kota Bogor, IPM, Pembangunan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Setiap kota terus berdinamika, baik cepat atau pun lambat (Abdullah, 2005). Dinamika suatu kota sangat berkaitan dengan manusia yang menghuninya. Gerak langkah manusia sebagai penghuni kota sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Dinamika perkembangan kota, yang dalam hal ini berarti kualitas manusia penghuninya dapat diukur dengan alat ukur yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) diketengahkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1990 yang mengukur tingkat kemajuan suatu wilayah dengan melihat pada tiga aspek, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Siagian, 1982). Ulasan terkait IPM menjadi hal yang menarik karena ketiga aspek IPM, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

Ulasan mengenai aspek IPM dalam suatu wilayah masih sering menjadi domain ilmu sosial ekonomi, utamanya ilmu ekonomi pembangunan. Namun demikian, sejarah juga dapat menempatkan diri sebagai suatu ilmu yang mengkaji aspek IPM suatu wilayah, utamanya terkait dengan dinamika manusia didalamnya yang berkaitan erat dengan sejarah pembangunan. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan pendekatan tersendiri agar sejarah dapat menangkap makna dari data-data pembangunan (berupa statistik IPM) agar karya sejarah yang terbangun (historiografi) dapat secara utuh tergambar (Prayogi, 2022). Secara konseptual, data-data terkait IPM tidak bisa ditarik ke tahun-tahun sebelum adanya IPM. Namun, ketiga indikatornya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat ditarik ke belakang.

Kota Bogor adalah salah satu kota yang menggunakan IPM sebagai alat ukur perkembangan kota. Data-data indikator statistik IPM Kota Bogor terdapat dalam buku seri yang berjudul Kota Bogor dalam Angka dan Jabar dalam Angka yang merupakan bagian dari seri penerbitan Badan Pusat Statistik (BPS). Buku ini memuat data statistik yang sangat komprehensif meliputi berbagai data statistik geografi, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, sosial, pertanian, perindustrian dan energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata,

keuangan dan harga-harga, serta pendapatan regional. Seluruh data yang ada dalam seri penerbitan ini berupa data statistic.

Tiga aspek yang digunakan untuk mengukur IPM pun dimuat dalam buku ini. Tiap tahunnya data-data ini senantiasa mengalami perubahan. Perubahan data tersebut terjadi tergantung kepada kebijakan pemerintah kota. Sera konseptual, perubahan angka-angka statistik ini tidak banyak diulas. Di sisi lain, kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terjadinya perubahan yang kemudian direkam dalam angka statistik. Dinamika seperti ini kemudian tidak dimuat dalam seri penerbitan dari Badan Pusat Statistik yang cenderung sinkronis Hal demikianlah yang menjadi latarbelakang penulisan artikel ini. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan telaah pada berbagai data statistik tersebut yang dengannya dapat tergambar suatu historiografi dengan cerita yang utuh. Di antara tiga aspek IPM, penulis memfokuskan pembahasan di bidang pendidikan. Alasannya adalah karena pendidikan adalah dasar bagi kemakmuran ekonomi dan kesehatan. Perlu pula diingat, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia salah satunya berasal dari sumbangsih kelas intelektual-terdidik.

Kota Bogor memiliki sejarah yang panjang (Drakeley, 2005). Keterkaitan kota Bogor dengan aspek pendidikan (formal) telah dimulai pada masa Hindia-Belanda. Kota Bogor –yang menjadi bagian wilayah Buitenzorg, dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda sebagai kota pusat administrasi dan pemerintahan. Pembangunan gedung *Algemenee Secretarie* di Buitenzorg merupakan bukti kesungguhan pemerintah Hindia-Belanda kala itu (Zakaria, 2010). Sebagai konsekuensi dari pembangunan kota pusat administrasi dan pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kerja terdidik menjadi meningkat. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu, pemerintah Hindia-Belanda membangun berbagai sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi (Ricklefs, 2001).

Pemerintah Hindia-Belanda juga membangun beberapa lembaga penelitian terkait pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ternyata, pemerintah Hindia-Belanda tidak hanya memproyeksikan Buitenzorg menjadi pusat administrasi dan pemerintahan tetapi juga menetapkannya sebagai pusat penelitian tanaman tropis dan perkebunan yang ditandai dengan dibangunnya Kebun Raya (*plantetuin*)

(Zakaria, 2010). Jadi, Bogor telah memiliki kaitan erat dengan pendidikan dari masa kolonial Belanda.

Dinamika pembangunan pendidikan terus berlangsung di hingga masa Orde Lama. Di masa ini, perhatian pemerintah terhadap pendidikan di Kota Bogor menjadi semakin baik. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi perguruan tinggi mandiri terpisah dari Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1963. Dinamika pemerintahan yang beralih dari Orde Lama ke Orde Baru semakin menegaskan bahwa aspek pendidikan tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan politik kenegaraan (Tirtosudarmo, 1994). Titik tekan aspek pembangunan pendidikan ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jenjang tersebut merupakan jenjang yang sangat mendasar. Sebagai pondasi, pembenahan pendidikan harus dimulai dari jenjang dasar dan menengah, terutama dalam hal pemerataan.

Perumusan pembangunan pendidikan Orde Baru dilaksanakan secara serius pada masa Pelita V. Berdasarkan GBHN 1988 memberikan arahan kepada pembangunan Pelita V. Di dalamnya terdapat dua tujuan Pelita V, yaitu meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat secara merata. Kedua, meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Dari arahan GBHN 1988, dapat diketahui bahwa salah satu fokus pembangunan pada 1989-1994 adalah pendidikan. Namun demikian, terdapat ketimpangan pembangunan pendidikan di Kota Bogor pada masa ini. Pembangunan yang seharusnya berdampak pada peningkatan jumlah sekolah dan peningkatan murid, pada kenyataannya justru menurun. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengungkap secara historis dinamika pembangunan pendidikan di kota Bogor di masa ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk, 2006). Tahapan pertama adalah heuristik. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *heuriskein* yang artinya menemukan (Herlina, 2008: 17). Tahapan pertama ini

adalah tahapan untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, sumber primer yang berasal dari pelaku atau saksi dan sumber sekunder yang berasal dari selain pelaku atau saksi (Kuntowijoyo, 2003). Pencarian sumber dilakukan di kantor arsip kota Bogor, perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat, perpustakaan Universitas Padjadjaran, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sumber yang telah dicari dan dikumpulkan kemudian diseleksi. Tahap penyeleksian sumber disebut tahap kritik. Kritik dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan seleksi terhadap kredibilitas sumber. Indikatornya adalah kemampuan sumber dalam mengungkapkan peristiwa. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran sumber dalam peristiwa, keahlian sumber, dan kedekatan sumber dengan peristiwa. Indikator selanjutnya adalah kemauan sumber dalam mengungkapkan peristiwa (Herlina, 2008: 30-34). Kritik ekstern adalah seleksi terhadap otentisitas sumber, dengan melakukan pengujian terhadap bahan sumber, meliputi material kertas, tinta, *watermark*, jenis huruf, gaya bahasa, dan tanggal yang ada pada sumber.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berupa data statistik. Penyeleksian data statistik adalah dengan melihat data statistik tahun satu pada data statistik tahun berikutnya. Umumnya, data statistik misalnya tabel jumlah sekolah tahun 1988. Dibawahnya ada informasi jumlah pada tahun 1987, 1986, dan 1985. Dengan begitu ada irisan antara satu data dengan data lainnya. Apabila tahun utama semisal tahun 1988 sama dengan tahun informasi 1988 di tabel tahun 1989 maka kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan lainnya adalah dengan mengumpulkan data dari dinas terkait, dalam hal ini data statistik yang dimiliki oleh dinas pendidikan. Setelah sumber diseleksi, maka akan terkumpul data yang perlu dimaknai. Proses pemaknaan data merupakan tahapan ketiga dalam metode sejarah, yaitu tahap interpretasi. Data yang telah dimaknai adalah fakta. Fakta yang ditemukan harus mendapat dukungan dari fakta-fakta lainnya, yang disebut proses koraborasi. Setelah semua proses dilakukan, proses selanjutnya adalah penulisan sejarah yang disebut dengan tahap historiografi.

Pada tahap ini semua fakta disusun menjadi bentuk narasi yang kronologis (Kartodirjdo, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pembangunan Pendidikan Pra Pelita V

Kota Bogor terletak pada $106^{\circ}43'30''$ sampai $106^{\circ}51'00''$ Bujur Timur dan $30^{\circ}30''$ – $6^{\circ}41'00''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 118.50 Km². Dalam kondisi spasial tersebut, kota Bogor memiliki 47.903 Rumah Tangga dengan jumlah anggota keluarga sebanyak 241.456 jiwa pada 1988. Jadi, rata-rata Rumah Tangga memiliki lima orang anggota. Tahun berikutnya, jumlah rumah tangga bertambah sekitar 3.2% menjadi 49.527 Rumah Tangga. Pertambahan tersebut berdampak pada jumlah Anggota Rumah Tangga yang juga meningkat, sekitar 3% menjadi 248.829 jiwa (Badan Pusat Statistik, 1990). Rata-rata anggota rumah tangga tetap lima orang per rumah tangga. Untuk lebih jelas lihat tabel di bawah ini:

Tabel 1. Penduduk Kota Bogor 1988-1989

Tahun	Rumah Tangga (RT)	Anggota Rumah Tangga (ART)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1988	47.983	120.458	120.998	241.456
1989	49.527	123.457	125.372	248.829

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Secara demografis, persebaran penduduk banyak terdapat di wilayah Bogor utara. Penyebabnya adalah wilayah Bogor utara adalah wilayah terdekat dengan Jakarta. Terdapat penduduk kota Bogor yang bekerja di Jakarta. Oleh karena itu wilayah utara menjadi pilihan utama bagi para penglaju. Kedekatan geografis dan posisi kota Bogor yang merupakan satelit dari Jakarta sangat memungkinkan hal tersebut. Wilayah terpadat selanjutnya secara berurutan adalah Bogor timur. Bogor selatan, Bogor barat dan Bogor tengah (Badan Pusat Statistik, 1990).

Pada 1988, Kota Bogor telah memiliki fasilitas pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai tinggi. Untuk lebih jelas lihat tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Negeri dan Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bogor Tahun Ajaran 1988/1989

1988/1989	SD	SMTB	SMTA/K	Jumlah
Sekolah	147	54	54	255

Guru	1.365	1.310	1.535	4.210
Murid	40.946	22.024	26.823	89.793

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sekitar 37% penduduk kota Bogor adalah murid jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekitar 4.7% penduduk berprofesi sebagai guru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Rata-rata tiap sekolah memiliki sebanyak 352 orang murid dan 16 orang guru. Rasio rata-rata untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah 1:21.

Kebijakan Pembangunan Pendidikan pada Pelita V

Pemerintah kota Bogor adalah pelaksana kebijakan di tingkat kota. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bogor berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat (Bappenas, 1989) dengan memperhatikan permasalahan dan potensi daerah (Badan Pusat Statistik, 1990) (Bappeda Kota Bogor, 1989). Kebijakan pembangunan pendidikan pemerintah kota Bogor terbagi dalam empat bagian, yaitu; sub sektor pendidikan dasar, pendidikan lanjutan tingkat pertama, pendidikan lanjutan tingkat atas, dan pendidikan tingkat tinggi.

Sub Sektor Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar meliputi sekolah dasar (SD). Kebijakan pembangunan pendidikan dasar tahun 1989-1994 berangkat dari kondisi masyarakat Kota Bogor masa Pelita IV. Pertumbuhan jumlah anak pada akhir Pelita IV adalah 3%. Dalam pendidikan dasar, persentase tersebut tergolong tinggi karena tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan sekolah dasar. Di samping timpangnya jumlah anak dengan sekolah, terdapat penyebab lain terhambatnya anak usia 7-12 tahun untuk menempuh pendidikan dasar (Bappeda Kota Bogor, 1989) (Simandjuntak & Pasaribu, 1986). Penyebab dapat diklasifikasikan dalam empat dimensi, yaitu:

Dimensi Murid

1. Dimensi ini mencakup kepada daya tampung yang tidak seimbang seperti yang dijelaskan sebelumnya.
2. Orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya.
3. Keterbatasan jumlah tenaga guru.

4. Masuknya murid usia SD dari luar Kota Bogor.
5. Beban mental dari calon siswa karena keterbatasan fisik.

Dimensi Guru

Rasio rata-rata guru dengan murid kota Bogor akhir Pelita IV tergolong cukup. Namun, persebarannya yang tidak merata pada sekolah negeri atau swasta merupakan masalah yang perlu dipecahkan. Permasalahan ini secara tidak langsung menghambat anak usia 7-12 tahun untuk bersekolah.

Dimensi Sarana dan Prasarana

Jumlah sekolah belum mampu mengimbangi jumlah murid secara proporsional. Akibatnya banyak murid usia 7-12 tahun yang belum masuk sekolah.

Dimensi Partisipasi Masyarakat

Masyarakat belum secara aktif terlibat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar. Bentuk nyata seperti sekolah dasar swasta masih dibutuhkan mengingat belum seluruhnya anak usia 7-12 tahun tertampung.

Kondisi di atas, menjadi pertimbangan pemerintah kota Bogor dalam mengambil kebijakan. Tujuan dari pembangunan pendidikan dasar 1989-1994 adalah memberi dan memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun. Hal itu sejalan dengan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi pendidikan kota pada 1988/1989, pemerintah kota Bogor mengeluarkan tujuh kebijakan pembangunan pendidikan dasar (Bappeda Kota Bogor, 1989). Kebijakannya, antara lain;

1. Rehabilitasi sekolah
2. Penambahan jumlah dan kualitas guru.
3. Pengoptimalan SD yang telah ada dengan membatasi jumlah maksimal shift sekolah menjadi dua.

4. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan SD.
5. Bantuan kepada orang tua yang kurang mampu dengan program orang tua asuh.
6. Rayonisasi untuk murid baru dalam upaya pengendalian arus masuk murid baru dari luar Kota Bogor.
7. Optimalisasi penyuluhan wajib belajar.

Tujuh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bogor bermuara pada tiga upaya, yaitu penambahan jumlah sekolah, guru, dan murid. Ketiganya saling berkaitan. Perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun tentu membutuhkan jumlah sekolah yang memadai (Gunardi & Wijaya, 1997). Pun dengan jumlah guru yang perlu diselaraskan dengan jumlah murid agar proses belajar-mengajar efektif.

Sub Sektor Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama

Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan pembangunan pendidikan lanjutan tingkat pertama. Pembangunan sekolah lanjutan pertama merupakan suatu kewajiban karena ini merupakan jenjang studi lanjutan dari SD. Lulusan SD belum mempunyai kemampuan yang memadai, oleh karena itu lulusan SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan.

Angkatan kerja tak terampil lulusan SD juga menjadi perhatian pemerintah kota Bogor. Sekolah lanjutan tingkat pertama akhir Pelita IV belum mampu menampung seluruh lulusan SD. Kebutuhan pembangunan sektor lanjutan tingkat pertama semakin mendesak karena pertumbuhan jumlah anak sebesar 3%/tahun. Pertumbuhan ini secara langsung menambah jumlah anak usia sekolah yang menempuh pendidikan dasar dan lulusannya yang perlu melanjutkan ke sekolah lanjutan pertama.

Penambahan sekolah dalam upaya mengimbangi lulusan SD tentu memerlukan penambahan jumlah guru pula. Akhir Pelita IV, jumlah guru sekolah lanjutan pertama masih terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh keterbatasan

perguruan tinggi menyiapkan calon guru dan proses pengangkatan calon guru yang memakan waktu lama. Kondisi lainnya adalah minimnya SMTP kejuruan. Pendidikan yang dilangsungkan di SMTP umum adalah untuk mempersiapkan murid melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan atas. Lulusan SMTP umum yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjutan atas menjadi angkatan kerja yang belum terampil. Oleh karena itu, SMTP kejuruan perlu disiapkan sebagai solusi permasalahan ini (Gunardi & Wijaya, 1997).

Berdasarkan kondisi pendidikan lanjutan pertama akhir Pelita IV, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan (Bappeda Kota Bogor, 1989), yaitu;

1. Pembangunan sekolah yang merata.
2. Penambahan tenaga guru dan optimalisasi tenaga guru yang ada. Optimalisasi dilakukan dengan perpanjangan masa tugas guru, penyederhanaan proses pengangkatan, penempatan, dan perpindahan calon guru, serta peningkatan kesejahteraan guru.
3. Peningkatan partisipasi sekolah swasta. Hal ini dilakukan dengan bantuan sarana dan prasarana, tenaga teknik, dan sistem akreditasi. Kebijakan ini dilaksanakan untuk menampung lulusan SD dan menyehatkan persaingan antar sekolah negeri dan swasta.
4. Membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
5. Membatasi arus murid baru masuk ke kota Bogor.

Lima kebijakan di atas dapat dibagi dalam dua poin yang saling menunjang. Pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana. Penambahan sekolah berarti penambahan jumlah guru. Pemerintah juga melibatkan pihak swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana. Di samping itu, penyediaan sekolah lanjutan pertama kejuruan merupakan solusi untuk mengatasi lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan. Pembangunan sekolah kejuruan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Tujuan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana berkaitan dengan poin yang kedua yaitu, perluasan kesempatan sekolah. Semakin luas kesempatan sekolah tentu semakin tinggi permintaan akan sarana dan

prasarana. Oleh karena itu, kedua poin ini saling berkaitan. Dalam upaya perluasan kesempatan sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu (Simandjuntak & Pasaribu, 1986).

Sub Sektor Pendidikan Lanjutan Tingkat Atas

Seperti pendidikan lanjutan tingkat pertama, sektor pendidikan lanjutan tingkat atas merupakan jenjang pendidikan yang harus ditempuh oleh lulusan SMTP umum. Keharusan ini disebabkan pendidikan lanjutan tingkat pertama bertujuan untuk menyiapkan murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lulusan SMTP yang tidak melanjutkan pendidikan menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan lanjutan tingkat atas. Seperti halnya kebijakan pada tingkat pendidikan sebelumnya, kondisi tingkat atas menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan (Simandjuntak & Pasaribu, 1986).

Akhir Pelita IV, pendidikan lanjutan tingkat atas belum dapat menampung seluruh lulusan SMTP. Lulusan yang tidak tertampung menjadi angkatan kerja yang belum memiliki keterampilan. Guna menghindari hal itu, pembangunan sekolah menjadi jalan keluar yang relevan. Kebutuhan untuk membangun sekolah baru perlu diimbangi dengan penyediaan tenaga guru yang memadai. Kondisi ini sama seperti kondisi guru pada jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama. Permasalahan terbatasnya penyediaan guru dari perguruan tinggi dan lamanya proses pengangkatan calon guru menjadi penyebab kurangnya jumlah guru.

Kondisi lainnya adalah terbatasnya jumlah sekolah kejuruan. Sekolah umum mengarahkan murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu perguruan tinggi. Sama seperti lulusan jenjang lanjutan pertama, lulusan jenjang lanjutan atas yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi akan menjadi angkatan kerja yang belum mempunyai keterampilan (Tikson, 2005). Oleh karena itu, sekolah kejuruan dibutuhkan guna menyelesaikan persoalan ini.

Berpedoman pada program pembangunan pemerintah pusat dengan memperhatikan kondisi lokal, Pemerintah kota Bogor mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan lanjutan tingkat atas (Bappeda Kota Bogor, 1989), sebagai berikut;

1. Pembangunan SMTA dan SMTA kejuruan dalam upaya untuk mengimbangi lulusan SMTP.
2. Penambahan tenaga guru terutama guru SMTA kejuruan.
3. Pembinaan SMTA swasta untuk menampung jumlah lulusan SMTP. Bantuan tenaga guru, sarana dan prasarana, penerapan sistem akreditasi menjadi pilihan pemerintah dalam rangka pembinaan SMTA swasta.
4. Pembebasan biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.
5. Membatasi arus murid baru SMTA masuk ke kota Bogor.

Kebijakan pembangunan pendidikan tingkat lanjutan atas serupa dengan jenjang sebelumnya. Fokus tetap pada penyediaan sekolah, guru, dan perluasan kesempatan belajar. Ketiga fokus ini sejalan dengan program pembangunan pendidikan pemerintah pusat. Hal penting lainnya adalah stimulasi pihak swasta untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan baik sekolah umum maupun sekolah kejuruan.

Keterbatasan daya tampung perguruan tinggi berakibat pada banyaknya lulusan SMTA yang menjadi angkatan kerja yang belum terampil. Seperti halnya jenjang pendidikan lanjutan tingkat pertama, sekolah kejuruan kembali menjadi pilihan pemerintah untuk menciptakan lulusan yang terampil. Sekolah kejuruan juga melibatkan swasta. Keterlibatan swasta pada penyediaan sekolah kejuruan dan umum membantu pemerintah dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat (Illich, 2000). Akhir Pelita IV, jumlah sekolah swasta lebih banyak daripada negeri. Namun, meningkatnya jumlah lulusan SMTP mengharuskan pemerintah menyediakan sekolah dan semakin melibatkan swasta dalam penyediaan sekolah umum maupun kejuruan.

Dinamika Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor pada PELITA V Tingkat Dasar

Pendidikan dasar merupakan awal dari rangkaian panjang pendidikan. Pendidikan dasar mendapat perhatian dari pemerintah dengan adanya kebijakan khusus. Pendidikan dasar sendiri terdiri dari dua jenjang, yaitu taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Tabel berikut menggambarkan kondisi SD di Kota Bogor tahun 1989-1994.

Tabel 3. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar di Kota Bogor 1989-1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1989/1990	147	23	40.422	7.681	-	-	-	-
1990/1991	147	22	40.119	7.678	1.527	251	26:1	30:1
1991/1992	147	22	39.679	7.611	1.525	249	26:1	30:1
1992/1993	147	22	39.593	7.485	-	231	-	32:1
1993/1994	147	22	38.268	7.337	1.545	245	25:1	31:1

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Dari tabel di atas, terdapat gambaran terkait dinamika pembangunan pendidikan di tingkat dasar dimana pada tahun ajaran 1990/1991 terjadi pengurangan jumlah sekolah swasta sebanyak satu sekolah. Berkurangnya sekolah swasta tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan pendidikan dasar pemerintah Kota Bogor. Upaya memperluas kesempatan belajar anak usia 7-12 tahun terhambat dengan berkurangnya jumlah sekolah. Persoalan lain terjadi pada jumlah murid. Jumlah murid tahun ajaran 1990/1991 untuk sekolah dasar baik negeri maupun swasta mengalami penurunan. Hal ini menandakan jumlah murid yang lulus lebih tinggi daripada jumlah murid yang masuk. Pertumbuhan jumlah penduduk anak yang mencapai angka 3% ternyata tidak membuat jumlah murid otomatis meningkat.

Penurunan murid pada sekolah negeri menandakan belum berhasilnya pelaksanaan kebijakan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun. Sementara itu, berkurangnya jumlah murid pada sekolah swasta merupakan akibat dari berkurangnya jumlah sekolah swasta. Artinya, pada tahun ajaran 1990/1991,

kebijakan pemerintah kota Bogor untuk menambah sekolah dan memperluas kesempatan belajar belum tercapai. Pada tahun ajaran 1991/1992 dan 1992/1993, upaya perluasan kesempatan belajar belum terwujud. Hal itu ditandai dengan jumlah sekolah baik negeri maupun swasta tetap sama seperti tahun ajaran sebelumnya. Namun, tren penurunan jumlah murid tetap terjadi. Tren ini juga merambah ke jumlah guru yang turut menurun. Akibat dari tren penurunan ini, rasio guru dan murid semakin besar.

Penerapan kebijakan penambahan guru terlihat pada tahun ajaran terakhir pelaksanaan. Jumlah guru yang cenderung mengalami penurunan pada tiga tahun ajaran pertama berhasil diperbaiki pada tahun ajaran kelima. Namun, jumlah sekolah tidak bertambah begitu juga dengan jumlah murid. Sekolah swasta berkurang satu sekolah pada tahun kedua pelaksanaan kebijakan sedangkan sekolah negeri jumlahnya tetap. Jumlah sekolah berhasil dipertahankan sampai tahun ajaran terakhir pelaksanaan kebijakan.

Kendala terbesar dari upaya penambahan jumlah sekolah adalah keterbatasan lahan. Permasalahan ini sudah muncul sejak akhir Pelita IV dan tetap tak terpecahkan sampai tahun ajaran 1993/1994 terbukti dengan jumlah sekolah yang tetap sama. Pertumbuhan penduduk yang mencapai 3%/tahun turut berdampak kepada penggunaan lahan. Jumlah sekolah yang cenderung tetap tidak mampu membuat jumlah murid tetap pula. Sejak tahun ajaran 1989/1990 sampai 1993/1994 jumlah murid terus mengalami penurunan baik di sekolah negeri maupun swasta. Pertumbuhan penduduk anak yang mencapai 3% tidak berdampak pada meningkatnya jumlah murid SD.

Keputusan rumah tangga untuk menyekolahkan anaknya ke SD dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Pada akhir Pelita IV, salah satu faktor penghambat anak usia 7-12 tahun bersekolah, salah satunya adalah orang tua yang tidak mampu secara ekonomi. Upaya ini ditanggulangi oleh program orang tua asuh dan pembebasan biaya pendidikan. Upaya tersebut tidak berjalan efektif karena terdapat faktor lain yang juga menentukan. Faktor lain yang mempengaruhi orang tua dalam melakukan penentuan prioritas konsumsi, yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). Peningkatan IHK menandakan terjadinya inflasi dimana harga

barang kebutuhan dasar meningkat. Peningkatan IHK tidak dibarengi dengan perbaikan sektor ketenagakerjaan. Akibatnya faktor penghambat bersekolahnya anak usia 7-12, yaitu ketidakmampuan orang tua yang terjadi pada akhir Pelita IV kembali terjadi pada 1989-1994 (Case & Flair, 2005) (Tirtosudarmo, 1994).

Dinamika Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor pada PELITA V Tingkat Menengah Pertama

Pendidikan menengah terdiri dari dua jenjang yaitu sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Istilah SLTP baru digunakan pada tahun ajaran 1990/1991 sebelumnya dinamakan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) pada tahun ajaran 1989/1990. Jenjang pendidikan ini merupakan kelanjutan dari jenjang pendidikan dasar. Lulusan SD/MI diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang ini. Alasannya, lulusan SD/MI masih belum memiliki keterampilan, jika tidak melanjutkan pendidikan maka lulusan SD/MI menjadi angkatan kerja yang belum terampil.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi SLTP di kota Bogor dari tahun ajaran 1989/1990 sampai 1993/1994.

Tabel 4. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SLTP di Kota Bogor dari Tahun Ajaran 1989/1990 sampai 1993/1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1989/1990	11	43	8.508	15.162	356	934	24:1	16:1
1990/1991	9	41	7.715	14.197	-	-	-	-
1991/1992	10	41	8.113	14.134	369	885	21:1	16:1
1992/1993	13	40	9.591	14.602	378	851	25:1	17:1
1993/1994	13	39	10.809	15.931	405	841	27:1	19:1

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Sama seperti sebelumnya, terdapat fenomena berkurangnya jumlah sekolah ada tahun ajaran 1990/1991. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan perluasan kesempatan belajar dengan upaya penambahan sekolah belum berjalan

efektif pada tahun ajaran 1990/1991. Dinamika pembangunan pendidikan di tingkat menengah pertama tergambar pada tahun ajaran 1992/1993, dimana jumlah murid sekolah negeri meningkat cukup drastis. Setelahnya, pada tahun ajaran 1993/1994 terjadi tren pertumbuhan jumlah murid sekolah negeri dan swasta. Di sisi lain, jumlah guru berbanding lurus dengan jumlah sekolah. Pertumbuhan positif sekolah negeri mengakibatkan pertumbuhan positif pula pada guru. Kondisi yang sama juga terjadi pada sekolah swasta. Sekolah swasta yang mengalami pertumbuhan negatif mengakibatkan jumlah guru semakin menyusut. Kebijakan pemerintah untuk menambah dan mengoptimalkan jumlah guru lebih terlihat hasilnya pada guru sekolah negeri.

Sekolah yang juga berada pada jenjang ini adalah SLTP kejuruan. Keberadaan sekolah kejuruan tingkat lanjutan pertama membantu mengurangi angkatan kerja yang belum terampil. Angkatan kerja yang dimaksud adalah lulusan SLTP yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMTA/SLTA. Alasan lainnya adalah kebutuhan pemerintah akan tenaga ahli dalam berbagai bidang keahlian untuk pembangunan. Pemerintah merumuskan kebijaksanaan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli yang kompeten. Wujud dari kebijaksanaan pemerintah adalah dengan membuka sekolah kejuruan di jenjang SLTP (Tirtosudarmo, 1994). Pembangunan SLTP kejuruan ini dimulai pada tahun ajaran kedua masa Repelita V, yaitu tahun ajaran 1990/1991.

Berikut adalah tabel yang memuat data jumlah sekolah, murid, dan guru pada SMTP/SLTP kejuruan di Kota Bogor dari 1989/1990 sampai 1993/1994.

Tabel 5. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SLTP Kejuruan di Kota Bogor Tahun Ajaran 1989/1990 – 1993/1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1989/1990	-	-	-	-	-	-	-	-
1990/1991	2	0	843	0	52	0	16:1	-
1991/1992	2	0	897	0	50	0	18:1	-
1992/1993	2	0	655	0	66	0	9:1	-

1993/1994	2	0	308	0	50	0	6:1	-
-----------	---	---	-----	---	----	---	-----	---

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Dari tabel di atas, tahun pertama dibangunnya SLTP kejuruan terdapat dua sekolah. Kedua sekolah itu adalah SLTP kejuruan negeri, sedangkan pihak swasta tidak membuka SLTP kejuruan. Pada tahun ajaran 1991/1992 hingga 1993/1994, jumlah sekolah kejuruan tetap sama, yaitu dua sekolah. Keduanya merupakan sekolah negeri. Jumlah sekolah yang tetap dan tidak berkembang menandakan kurang populernya sekolah ini di masyarakat. Berbeda dengan jumlah sekolah umum negeri yang cenderung mengalami peningkatan.

Stagnasi jumlah sekolah tidak berarti stagnasi pada jumlah murid. Pada tahun ajaran kedua munculnya sekolah kejuruan, jumlah murid sekolah kejuruan adalah 897 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 54 orang. Namun demikian, peningkatan jumlah murid tidak terjadi lagi pada tahun ajaran berikutnya. Penurunan jumlah murid yang menjadi tren tiga tahun ajaran terakhir menandakan ketidakpopuleran SLTP kejuruan di kalangan masyarakat (Tirtosudarmo, 1994). Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah murid SLTP umum yang cenderung meningkat pada tahun-tahun ajaran terakhir pelaksanaan kebijakan. Upaya untuk menekan angka angkatan kerja yang belum terampil lulusan SLTP belum terlihat dalam SLTP kejuruan. Dari sisi jumlah guru, pada tahun ajaran 1993/1994, baru terjadi penurunan jumlah guru. Penurunan jumlah guru tahun ini selaras dengan murid. Penurunan kedua komponen ini menandakan sekolah kejuruan setingkat SLTP tidak lagi populer di tengah masyarakat. Guru yang berkurang lebih dikarenakan kesulitan dalam penyediaan tenaga ahli yang tentu berbeda dengan guru sekolah umum.

Dinamika Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor pada PELITA V Tingkat Menengah Atas

Jenjang pendidikan menengah atas terbagi menjadi dua jenis, yaitu SLTA umum, SLTA kejuruan. Gambaran statistik pendidikan tingkat menengah atas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SLTA Umum di Kota Bogor
Tahun Ajaran 1989-1994**

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1989/1990	6	29	5.414	9.214	294	796	18:1	12:1
1990/1991	6	27	5.629	9.508	332	821	16:1	11:1
1991/1992	7	26	6.145	-	372	604	16:1	-
1992/1993	7	26	6.561	9.005	755	1.123	8:1	8:1
1993/1994	8	24	6.956	9.469	398	694	17:1	14:1

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Pada tabel di atas, dinamika pembangunan pendidikan di kota Bogor pada tingkat menengah atas terlihat dari penambahan secara konsisten sekolah negeri dan pengurangan sekolah swasta. Artinya, penambahan sekolah negeri sesuai dengan kebijakan sektor lanjutan atas. Namun demikian kondisi sebaliknya dialami oleh sekolah swasta. Tren penurunan jumlah sekolah swasta menandakan kebijakan untuk mendorong swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tidak berjalan efektif (Sholeh, 2007). Kebijakan yang tidak berjalan efektif itu diperkuat dengan bertambahnya jumlah sekolah negeri. Artinya, upaya untuk menyetarakan sekolah swasta dengan negeri dengan upaya akreditasi, penyediaan sarana dan prasarana, dan bantuan tenaga teknik tidak berjalan efektif untuk paling tidak menjaga kestabilan jumlah sekolah swasta. Di samping itu, sekolah swasta yang memang tidak didanai oleh pemerintah harus berhadapan dengan tren kenaikan IHK.

Kebijakan perluasan kesempatan belajar yang terlihat dari jumlah murid berjalan baik. Pada sekolah negeri dan swasta, kebijakan ini sudah dapat terlihat pada tahun ajaran 1990/1991. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan jumlah murid secara konsisten terjadi di sekolah negeri. Sekolah swasta cenderung fluktuatif, tetapi pada akhir tahun ajaran jumlah murid kembali meningkat.

Selain sekolah dan murid, guru juga mendapat perhatian dari pemerintah. Penambahan jumlah guru untuk sekolah umum bukanlah yang utama karena fokus pemerintah adalah penyediaan guru sekolah kejuruan. Namun, melihat jumlah

sekolah dan murid yang cenderung meningkat maka ketersediaan guru perlu diperhatikan. Seperti jumlah sekolah dan murid, jumlah guru sekolah negeri meningkat secara konsisten. Kebijakan pemerintah untuk penambahan jumlah guru berjalan baik di sekolah negeri. Untuk jumlah guru sekolah swasta peningkatan secara bertahap tidak terlihat. Hal itu merupakan akibat dari penurunan jumlah sekolah swasta.

Selain SLTA umum, jenjang pendidikan lanjutan memiliki SLTA kejuruan. Jenjang ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan kebijaksanaan yang ada dalam Repelita V, yaitu penekanan pada pendidikan kejuruan. Tabel berikut menggambarkan kondisi SLTA kejuruan di kota Bogor di tahun ajaran awal penerapan Repelita V, 1989/1990 hingga 1993/1994.

Tabel 7. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SLTA Kejuruan di Kota Bogor Tahun Ajaran 1989/1990-1993/1994

TAHUN	Sekolah		Murid		Guru		Rasio	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1989/1990	5	14	3.023	9.728	282	470	11:1	21:1
1990/1991	5	16	2.641	10.762	277	477	9:1	22:1
1991/1992	3	14	2.280	11.660	207	504	11:1	23:1
1992/1993	3	18	2.455	14.467	212	617	11:1	23:1
1993/1994	3	18	2.537	15.835	214	859	12:1	18:1

Sumber: Jawa Barat dalam Angka

Dinamika pembangunan pendidikan di kota Bogor jika melihat tabel di atas berkebalikan dengan kondisi sebelumnya, dimana terjadi penurunan jumlah sekolah yang menjadi tren sekolah kejuruan negeri, justru tidak terjadi pada sekolah kejuruan swasta. Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan bantuan pada sekolah swasta dan bantuan ini kemudian mendapat respon positif dari pihak swasta. Terlebih lagi pemerintah tengah mengupayakan penambahan sekolah kejuruan guna mengantisipasi banyaknya lulusan SLTA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi yang berakibat munculnya angkatan kerja yang belum terampil (Sholeh, 2007). Upaya pemerintah untuk merangsang pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan kebijakan

pembangunan pendidikan kejuruan. Selama lima tahun (1989-1994) jumlah sekolah kejuruan swasta secara konsisten terus meningkat. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemenuhan permintaan masyarakat akan sekolah kejuruan swasta.

Kebijakan pemerintah dalam merangsang pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan menengah atas kejuruan berjalan lancar. Jumlah sekolah swasta selama lima tahun bertambah empat sekolah. Jumlah murid pun turut meningkat, peningkatan itu juga ditunjang oleh bertambahnya jumlah guru. Berbeda halnya dengan sekolah negeri yang cenderung turun. Namun, sekolah negeri juga turut berkontribusi dalam perluasan kesempatan belajar. Jumlah keseluruhan sekolah kejuruan meningkat, begitu pula dengan jumlah murid, dan jumlah guru pun sama. Perluasan kesempatan belajar dan penambahan guru terutama kejuruan pada pendidikan menengah kejuruan secara keseluruhan berjalan baik.

KESIMPULAN

Pendidikan di Kota Bogor tahun ajaran 1988/1989 dapat dirinci menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat pendidikan dasar, lanjutan pertama, dan lanjutan atas. Tingkat pendidikan dasar terdiri dari dua lembaga, yaitu SD. Tingkat pendidikan lanjutan pertama terdiri dari tiga lembaga, yaitu SMTP/SLTP umum, dan SLTP kejuruan. Seperti lanjutan pertama, tingkat pendidikan lanjutan atas juga terdiri dari dua lembaga, yaitu SMTA/SLTA umum, dan SMTA/SLTA kejuruan. Untuk mengetahui kondisi umum ketiga tingkatan itu dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu sekolah, murid, dan guru.

Pada tingkat pendidikan dasar tahun 1988/1989, jumlah SD adalah 147 sekolah. Dari jumlah sekolah tersebut, murid yang bersekolah di SD adalah 40.946 orang. Guru yang tersedia untuk jenjang ini adalah 1.365 orang untuk SD. Di tahun ini, swasta sudah terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Tingkat selanjutnya adalah lanjutan pertama. Pada 1988/1989, jumlah SMTP adalah 54 sekolah. Murid yang bersekolah di jenjang ini adalah 22.024 orang SMTP. Guru yang tersedia pada jenjang ini adalah 1.535 orang untuk SMTP. Tingkat

selanjutnya adalah lanjutan atas. Jumlah SMTA/K adalah 54 sekolah. Murid yang menempuh pendidikan di jenjang ini adalah 26.823 orang untuk SMTA/K. Jumlah guru yang tersedia untuk SMTA/K adalah 1.535 orang.

Kondisi pendidikan tahun ajaran 1988/1989 masih ditemukan beberapa kekurangan. Dari ketiga jenjang pendidikan, permasalahan yang dihadapi adalah sama. Permasalahan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu perluasan kesempatan belajar, penyediaan sekolah, dan penambahan guru. Permasalahan ini menjadi pertimbangan pemerintah kota Bogor dalam mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan.

Dengan berpedoman pada rencana pembangunan pemerintah pusat dan kondisi lokal, pemerintah kota Bogor mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpusat pada empat hal. *Pertama*, perluasan kesempatan belajar dengan cara penambahan jumlah sekolah, pemberdayaan orang tua asuh, dan penyebarluasan program wajib belajar. Kebijakan *kedua* adalah penyediaan jumlah guru dengan cara menyederhanakan proses pengangkatan dan memanjangkan masa pengabdian guru. *Ketiga*, memperbanyak sekolah kejuruan untuk menanggulangi angkatan kerja yang belum terampil akibat lulusan SD/SLTP/SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan. *Keempat*, melibatkan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan cara memberi bantuan teknik, sarana dan prasarana, serta akreditasi.

Selama lima tahun penerapan kebijakan, pendidikan di kota Bogor secara umum mengalami kemajuan. Tahun 1994, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar adalah 169 untuk SD. Peningkatan jumlah sekolah berdampak pada jumlah murid. Jumlah murid SD adalah 45.603 murid. Jumlah guru pun meningkat menjadi 1.790 orang untuk SD. Jenjang pendidikan lanjutan atas juga meningkat. Di tahun 1994, jumlah SLTP umum ditambah dengan SLTP kejuruan yang baru berjalan tahun 1989/1990 adalah 54 sekolah. Jumlah tersebut mayoritas dimiliki oleh swasta. Walaupun jumlah SLTP sama dengan tahun 1989, tetapi daya tampungnya bertambah menjadi 27.408 murid untuk SLTP umum dan kejuruan. Jumlah guru yang tersedia untuk jenjang ini adalah 1.296 orang untuk SLTP umum dan kejuruan. Jumlah guru SLTP menurun seluruhnya terjadi pada sekolah

swasta dimana pembiayaan ditanggung oleh swasta. Jenjang lanjutan atas secara umum menunjukkan peningkatan. Jumlah SLTA/K adalah 55 sekolah. Peningkatan jumlah sekolah berdampak pada jumlah murid. Murid SLTA/K jumlahnya adalah 36.327 murid dan jumlah guru SLTA/K adalah 2.236 orang.

Secara rinci terdapat sekolah-sekolah yang mengalami penurunan jumlah murid. Keadaan orang tua yang tidak mampu tetap ditemui selama masa pelaksanaan kebijakan. Banyak sekolah swasta dan gurunya yang mengalami penurunan. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara peningkatan IHK dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi, faktor penting yang sepatutnya diperhatikan dalam rangka pembangunan pendidikan adalah kondisi ekonomi masyarakat. Bila kondisi ekonomi masyarakat baik dan mampu mengimbangi laju IHK, kebijakan perluasan kesempatan belajar dapat berjalan efektif dan upaya untuk melibatkan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan akan direspon baik oleh swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (ed.). (2005). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Badan Pusat Statistik. (1988). *Jawa Barat Dalam Angka 1987*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1989). *Jawa Barat Dalam Angka 1988*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 1990. *Jawa Barat Dalam Angka 1989*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1990). *Kota Bogor dalam Angka Tahun 1989*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1991). *Jawa Barat Dalam Angka 1990*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1992). *Jawa Barat Dalam Angka 1991*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1993). *Jawa Barat Dalam Angka 1992*. Badan Pusat Statistik.
- _____. (1994). *Jawa Barat Dalam Angka 1993*. Badan Pusat Statistik.
- Bappeda Kota Bogor. (1989). *Rencana Pembangunan Lima Tahun ke Lima-Kota DT II Bogor (1989/1990-1993/1994): Buku II Rencana Sektor Pembangunan*. Bogor: Bappeda Kota Bogor.
- Bappenas. (1989). *Repelita V: Buku II*. Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.
- Case, K. E., & Flair, R. C. (2005). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Mikro*. (B. Muhammad, Penerj.) Jakarta: Indeks.
- Drakeley, S. (2005). *The History of Indonesia*. Westport: Greenwood.
- Gottschalk, L. (2006). *Mengerti Sejarah*. (N. Notosusanto, Penerj.) Jakarta: UI Press.
- Gunardi, T., & Wijaya, J. (1997). *Perkembangan Pendidikan di Jawa Barat*. Bandung: Armico.

- Herlina, N. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Illich, I. (2000). *Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah*. (S. A. Keraf, Penerj.) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirjdo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Prayogi, A. (2022). Perspektif Filosofis dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 23(2), 23-32.
- Prayogi, A. (2022). Telaah Konseptual Pendekatan Kuantitatif dalam Sejarah. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 8(1).
- Prayogi, A. (2023). The Role of History as a Science in Sustainable Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(1), 16-23.
- Ricklefs, M. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Basingstoke: Palgrave.
- Said, M., & Mansoer, D. (1959). *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Pustaka Rakjat.
- Sholeh, M. (2007). *Cita-Cita Realita Pendidikan; Pemikiran dan Aksi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: IPE.
- Siagian, S. P. (1982). *Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simandjuntak, B., & Pasaribu, I. (1986). *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Tarsito.
- Sirozi, M. (2005). *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tikson, D. T. (2005). *Keterbelakangan dan Ketergantungan: Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand*. Makassar: Inninawa.
- Tirtosudarmo, R. (1994). *Dinamika Pendidikan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Perkotaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zakaria, M. M. (2010). *Kota Bogor; Studi tentang Perkembangan Ekologi Kota Abad ke-19 hingga ke-20*. Sumedang: Sastra Unpad Press: Sastra Unpad Press.